

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang

Sarah Novatna, M. Fachri Adnan
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Padang
E-mail: sarah.novatna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang. Latar belakang penelitian dilakukan karena masyarakat kampung Keluarga Berencana di Kota Padang terdiri dari penduduk miskin, perkampungan kumuh dan berpenghasilan rendah. Maka, untuk mengatasi masalah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi Kampung Keluarga Berencana Terintegrasi (KaKaBeTi) dapat dijadikan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan/mendisplay data, dan memverifikasi data. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Dari penelitian yang telah dilaksanakan di kampung Keluarga Berencana di Kota Padang terkait masalah efektifitas pemberdayaan masyarakat kampung Keluarga Berencana, pemberdayaan masyarakat sudah mulai direalisasikan oleh masyarakat kampung Keluarga Berencana di Kota Padang. Namun belum efektif bahwa suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif dengan menggunakan ukuran sebagai berikut: pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, penyusunan program yang tepat. Ketiga, system pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Keempat, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Kelima, tersedianya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *efektivitas, kampung KB, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat*

ABSTRACT

This research aims to explain the Empowerment of Village Family Planning Communities in the City of Padang. The background of the research was that the family planning village community in the city of Padang consisted of poor people, slums and low-income residents. So, to overcome the problem of Population Family Planning and Family

Development (KKBPK) with the use and installation of contraception Village Integrated Family Planning (KaKaBeTi) can be used as a form of community empowerment through programs that lead to efforts to change attitudes, behaviors and ways of thinking (mindset) community towards a better, so that the village that was left behind and backward can be aligned with other villages. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques based on observation, interviews and documentation studies. The selection of informants is done by purposive sampling in which the informants are chosen based on the research objectives. Data analysis techniques use interactive analysis techniques, namely by reducing data, presenting / displaying data, and verifying data. Test the validity of the data using source triangulation techniques. From the research that has been carried out in the family planning village in the city of Padang related to the issue of the effectiveness of the empowerment of the village family planning community, community empowerment has begun to be realized by the village community in the Kota Laga Kota planning program. But it is not yet effective that a program or policy can be said to be effective using the following measures: first, the clarity of the objectives to be achieved. Second, the preparation of the right program. Third, the system of supervision and control that is educational. Fourth, the implementation of tasks effectively and efficiently. Fifth, the availability of facilities and infrastructure.

Keywords : *effectiveness, KB village, poverty, community empowerment*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author.

Received: Jan 16 2020

Revised: Feb 17 2020

Accepted: Feb 17 2020

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan KB menekankan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan KB. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Pemeritah Kabupaten/Kota.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah membuat kebijakan dan program untuk

mengendalikan penduduk yang disebabkan meledaknya jumlah penduduk. Salah satu terobosan terbaru dari BKKBN yaitu pada tahun 2016 membuat program strategis yang menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengentaskan kemiskinan yaitu "Program Kampung KB" yang merupakan nawacita presiden.

Menurut Zuhriyah (dalam Aminatuz, 2017: 1-13. Jurnal HIGEIA Journal Of Public Health Research and Development Vol. 1 No. 4) Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan

kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Program Kampung KB dibentuk dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu: (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) Penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBP) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (3) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3, 5 dan 8, (4) Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010-2030.

Menurut Mardikanto dkk (2015:33) pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitas sosialnya.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disini melalui intervensi program. Dimana Pembangunan tersebut tergabung dalam program-program yang mencakup 8 fungsi keluarga yaitu: fungsi agama, reproduksi, cinta kasih, perlindungan,

sosial budaya, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi lingkungan. Kelompok kegiatan UPPKS, BKB, BKR, BKL masih jauh dari harapan dan belum ideal. Kelompok kegiatan hanya memiliki satu kelompok sedangkan idealnya adalah dua kelompok dalam satu kampung KB. Kelompok kegiatan tersebut melakukan pertemuan berkala setiap satu bulan sekali di rumah data kampung KB.

Masyarakat kampung KB di Kota Padang terdiri dari penduduk miskin, perkampungan kumuh, dan berpenghasilan rendah. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam mewujudkan program kampung KB. Merubah mindset masyarakat disana juga tidak mudah dikarenakan faktor pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pembangunan fisik & non fisik. Dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi Kampung KB Terintegrasi (KaKaBeTi) dapat dijadikan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya.

Penguatan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penilaian efektivitas program percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Robbins (dalam Tika, 2010:129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Hal tersebut selaras dengan pendapat Saxena (dalam Fariani, 2014:19) menjelaskan efektivitas

merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) yang telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pemberdayaan masyarakat kampung KB di Kota Padang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan masyarakat kampung KB peneliti menggunakan 5 dari 8 indikator pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian (1984:32-35) yaitu: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, penyusunan program yang tepat, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, tersedianya sarana dan prasarana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Melalui metode ini kita dapat menemukan dan memahami realita yang terjadi di lapangan sebagaimana mestinya sehingga dengan cara demikian kita dapat mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh dan jelas. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendapatkan temuan dalam secara mendalam tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat kampung KB di Kota Padang.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BKKBN Kota Padang. Menurut Zuhriyah (2009:141), teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas menurut Sugiyono (2009:363) adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BKKBN yang merupakan tempat penyelenggaraan pelatihan kerja bagi peserta pelatihan, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memotivasi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan stakeholder agar KKB yang masih tertinggal dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan cara memfokuskan kegiatan-kegiatan terintegrasi dan program-

program seluruh sektor yang terkait pemberdayaan masyarakat KKB. Pencapaian tujuan dapat dilihat melalui dua tahapan yaitu dari segi kuantitas dan kualitasnya. Pada tahun 2018 seluruh Kecamatan sudah membentuk KKB dan melibatkan 11 sektor yang terkait agar pada tahun 2019 setiap kabupaten dapat membuat kampung-kampung KB percontohan.

Agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat KKB dan sebagai lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil berkualitas, maka BKKBN memiliki program khusus dalam pemberdayaan masyarakat KKB di Kota Padang yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat dimana dengan program tersebut dapat membantu masyarakat terhindar dari angka kematian hidup terutama di desa-desa. Selanjutnya masyarakat KKB tersebut diberi pelatihan dan pembinaan BKB, BKR, dan peningkatan usaha ekonomi produktif. Dalam penyusunan program yang tepat ada beberapa pertimbangan bagi BKKBN terkait program-program dalam pemberdayaan masyarakat bahwasanya di daerah-daerah yang tertinggal itu sangat rawan masalah angka kematian bayi dan balita.

Cara yang dilakukan BKKBN dengan menyusun program tersebut melalui kebijakan dan penancangan dari Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan dinas sosial serta sektor yang terkait. Pengawasan yang di berikan oleh lintas sektor seperti dinas PU kepada kampung KB di Kota Padang dari segi sarana dan prasarananya sudah cukup bagus.

Dengan adanya pembinaan dan rapat-rapat koordinasi ini akan membantu sistem pengendalian BKKBN dalam mengatasi masalah pemberdayaan masyarakat yang dimana sistem pelaporannya sudah online, dan diharapkan kampung KB dapat terintegrasi dengan baik.

Kemudian BKKBN juga melakukan penyusunan program pelatihan kerja dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dengan kader-kadernya kepada masyarakat yang ada di kampung KB di Kota Padang. BKKBN lebih memfokuskan bagaimana cara menyusun perencanaan, rapat koordinasi, dan pelaporan agar nantinya ketika mereka membutuhkan sesuatu dengan lintas sektor mereka tidak bingung karena sudah mengetahui cara mengajak lintas sektor agar bisa terjun langsung ke kampung KB di Kota Padang. Sebulan sekali diadakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui intervensi dan lintas sektor yang terkait termasuk 8 fungsi keluarga yaitu: fungsi agama, reproduksi, cinta kasih, perlindungan, social budaya, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, fungsi pendidikan.

Pokja-pokja KKB di Kota Padang belum memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan sehingga masih perlu pengawasan untuk membangun mentalitas masyarakat supaya bisa bangkit dari ketertinggalan selama ini agar pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat. Sarana dan prasarana paling dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat pertama sekali adalah jalan sebagai akses masyarakat dalam segala hal. Kedua

sanitasi, ketiga, rumah dataku sebagai lokasi pertemuan berkala setiap satu bulan sekali dari masyarakat dan pokja-pokja kampung KB.

Hal ini sejalan dengan indikator efektifitas organisasi yang dikemukakan oleh Siagian (1984: 32-35) yang mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, penyusunan program yang tepat, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, serta tersedianya sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat sudah mulai direalisasikan oleh masyarakat kampung Keluarga Berencana di Kota Padang. Namun belum efektif karena suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif dengan menggunakan indikator yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, penyusunan program yang tepat, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, tersedianya sarana dan prasarana. Dari lima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian diatas memang sudah dilaksanakan namun belum menunjukkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, J Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Siagian, P Sondang. 1984. Management Modern. Jakarta: Gunung Agung
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

- Fariani, Dina. 2014. Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Cilegon. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
- Mardikanto, Totok 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Zuhriyah, dalam Aminatuz, 2017: 1-13. Jurnal HIGEIA Journal Of Public Health Research and Development Vol. 1 No. 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan KB
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.